

## ANALISIS PERATURAN DAN MEKANISME PRODUK KREDIT PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH TAHUN 2015

Oleh  
Hadiana

Jurusan Pendidikan Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [Diana\\_hadi46@yahoo.com](mailto:Diana_hadi46@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional, (2) peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian syariah, dan (3) Perbedaan pelaksanaan peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) peraturan produk kredit KCA, KREASI, KRASIDA dan Mulia pada pegadaian konvensional memiliki perbedaan antara produk kredit satu dengan yang lainnya, namun mekanisme antara produk kredit KCA dan KRASIDA memiliki kesamaan. (2) peraturan dan mekanisme produk pembiayaan *Rahn*, *Arrum*, Amanah dan Mulia pada pegadaian syariah memiliki perbedaan antara produk pembiayaan satu dan yang lain dikarenakan dari masing-masing produk pembiayaan syariah memiliki jenis dan tujuan yang berbeda. (3) perbedaan peraturan dan mekanisme dalam produk kredit yaitu (a) KCA dan *Rahn* terletak pada istilah formulir, perhitungan *ijaroh*/sewa modal, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan. (b) KREASI dan *Arrum* terletak pada penetapan uang pinjaman, perhitungan *ijaroh*/sewa modal, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan. (c) KRASIDA dan Amanah antara peraturan dan mekanisme terdapat perbedaan secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Peraturan, Mekanisme, Produk Kredit.

### Abstract

The purposes of this research are to know (1) the rules and mechanism of product credit in conventional pawn shop, (2) the rules and mechanism of product cost in sharia pawn shop, and (3) The difference implementation of rules and mechanism for product credit in conventional and sharia pawn shop. The present research was descriptive. Data was collected by interview and documentation which was analyzed by descriptive analysis technique with qualitative approach. The research result showed that (1) the rules of credit products KCA, KREASI, KRASIDA and Mulia in conventional pawn shop is different from among one credit product to the other, but mechanism between credit product KCA and KRASIDA are similar. (2) the rules and mechanism cost product *Rahn*, *Arrum*, Amanah and Mulia in sharia pawn shop are different from because each sharia cost product has its own types and purpose. (3) the difference of rules and mechanisms in credit products are (a) KCA and *Rahn* lie on the form terms, *ijaroh* calculation/fund lending, greementt/aqad and the foundation who accept. The differences of rules and mechanisms in credit products are (a) KCA and *Rahn* lie on the form terms of the *ijaroh* calculation/fund lending, agreement/akad and the institution who accept the remainder of auction. However, there is no difference in the mechanism. (b) the difference between KREASI and *Arrum* lie on the decision for money lending, calculation of *ijaroh*/fund lending, agreement/akad and the institution who accept the remainder of auction, however, there is no difference in the implementation. (c) There are total differences between the rules and mechanism of KRASIDA dan Amanah.

**Keywords:** Regulation, Mechanism, Credit Products.

## PENDAHULUAN

Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat atas dasar hukum gadai dan sebagai sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia. Tugas pokok pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Meminjam uang ke perum pegadaian tidak hanya karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang terjadi dilapangan yang melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto *"menyelesaikan masalah tanpa masalah"*.

Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Menurut Kasmir (2010:262) secara umum pengertian usaha gadai adalah "kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai".

Pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah

cukup membawa KTP dan barang-barang tertentu sebagai agunan atau jaminan. Dengan barang jaminan tersebut seperti emas, motor dan sebagainya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Hanya dengan menyerahkan jaminan, nasabah dapat meminjam sejumlah dana atau bisa langsung mendapat dana yang dibutuhkan sesuai dengan nilai taksir dari barang tersebut. Selain itu, suku bunga yang ditawarkan oleh pegadaian relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya, apalagi suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro. Hal ini, membuat lembaga pegadaian mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya, dalam hal persyaratan dan prosedurnya yang sederhana sehingga membutuhkan waktu yang singkat untuk memperoleh dana. Oleh karena itu dengan adanya pegadaian masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang berharga yang dimiliki ketika sudah masuk dalam lembaga pegadaian. Masyarakat juga dapat memperoleh dana yang diinginkan sesuai dengan barang yang dijaminkan.

Dalam perkembangannya kemudian pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Sama halnya dengan perbankan syariah, pegadaian syariah tidak mengenal sistem kredit tetapi menggunakan istilah pembiayaan. Kredit merupakan pemberian pinjaman berupa barang, uang atau jasa kepada seseorang dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian beserta bunga yang berlaku pada masing-masing lembaga pembiayaan sedangkan Hertanto Widodo menjelaskan pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) kepada pihak ke tiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu

tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Pegadaian syariah tidak mengenal sistem bunga, karena keberadaan gadai syariah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah yakni *muamalah* atau transaksi tanpa riba, karena riba dianggap tidak sesuai dengan hukum islam, dalam gadai syariah dikenal dengan istilah *ijarah* atau sewa tempat. Menurut Antonio (2001: 37), pengertian riba adalah “pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah*”.

Menurut Tri Pudji Susilowati (2008), pegadaian memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Pada pegadaian konvensional terdapat tambahan sejumlah uang yang harus dibayar pada saat membayar utang yang disebut sebagai sewa modal atau bunga, besarnya bunga dibebankan dari besar kecilnya dana yang dipinjam. Dalam praktek pegadaian syariah nasabah hanya diharuskan membayar uang sebagai perawatan barang yang dijadikan jaminan kepada pihak pegadaian. Dimana besar kecil biaya tidak tergantung dengan besar kecilnya dana yang dipinjam, akan tetapi dilihat dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan prinsip mendasar dari masing-masing pegadaian.

Dalam pegadaian syariah, istilah-istilah yang digunakan pada produk gadai berbeda dengan istilah produk gadai dalam pegadaian konvensional. selain mengeluarkan produk gadai yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, terdapat pula akad-akad yang harus dipahami. Akad-akad tersebut telah disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Produk jasa gadai syariah

merupakan hal yang baru, sehingga banyak dari masyarakat yang masih awam belum mengetahui peraturan dan mekanismenya, apakah sama dengan pegadaian konvensional atau tidak. Untuk mengetahui apakah dalam peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah terdapat perbedaan, maka judul yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Syariah Tahun 2015”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa peraturan, mekanisme dan produk kredit yang dikeluarkan oleh pegadaian konvensional dan syariah yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Dari data tersebut kemudian dianalisis sehingga diketahui perbedaan peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah PT Pegadaian (persero) Konvensional Cabang Singaraja yang beralamat di jalan A. Yani No. 42 Singaraja dan pada PT Pegadaian (persero) Syariah Cabang Denpasar yang beralamat di jalan Kartini No. 200 Wangaya, Denpasar -Bali.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yang berupa peraturan dan mekanisme produk kredit pada PT Pegadaian (persero) konvensional dan syariah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak pegadaian konvensional dan syariah. Data primer dalam penelitian ini berupa data tentang peraturan dan mekanisme/prosedur produk kredit tahun 2015.

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data berupa produk kredit yang dikeluarkan oleh pegadaian konvensional dan syariah, jenis barang gadai atau agunan, ketentuan dan proses gadai dengan pedoman wawancara sebagai instrumennya. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan mengkaji dokumen dokumen terkait milik

PT Pegadaian (persero) konvensional dan syariah guna untuk mendapatkan data peraturan dan mekanisme pemberian produk kredit kepada nasabah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dideskripsikan atau dipaparkan bagaimana peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah tahun 2015.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada PT Pegadaian (Persero) Konvensional

#### a. Kredit Cepat Aman (KCA)

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 35/UG.2.00212/2012 tentang perubahan penggolongan uang pinjaman, pembulatan uang pinjaman, tarif biaya administrasi dan penetapan tarif sewa modal pegadaian KCA, besarnya prosentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 Maret 2012. Dan Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 38 tahun 2014 tanggal 23 juni 2014 tentang Kenaikan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, dan Ujrah Rahn golongan B, C dan D. Adapun ketentuan KCA dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Ketentuan dalam Kredit Cepat Aman (KCA)

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal		Persentase terhadap taksiran	Pembulatan pinjaman	Tarif biaya Administrasi (Rp)
		Per 15 hari	Maksimal			
A	50.000,00 – 500.000,00	0,75%	6,00%	95,00%	10.000,00	2.000,00
B1	550.000,00 – 1.000.000,00	1,20%	9,60%	92,00%	50.000,00	8.000,00
B2	1.050.000,00 – 2.500.000,00	1,20%	9,60%	92,00%	50.000,00	15.000,00
B3	2.550.000,00 – 5.000.000,00	1,20%	9,60%	92,00%	50.000,00	25.000,00
C1	5.100.000,00 – 10.000.000,00	1,20%	9,60%	92,00%	100.000,00	40.000,00
C2	10.100.000,00 – 15.000.000,00	1,20%	9,60%	92,00%	100.000,00	50.000,00
C3	15.100.000,00 – 20.000.000,00	1,20%	9,60%	92,00%	100.000,00	80.000,00
	Di atas 20.000.000,00	-	-	-		
D	D = Kantong	1,04%	8,32%	93,00%	100.000,00	100.000,00
	D = Gudang	1,15%	9,20%	93,00%		

(Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan PT Pegadaian (persero) dan Entitas Anak)

Prosedur pengajuan kredit KCA sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke *outlet* pegadaian. Proses pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit. Pinjaman mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa perlu buka rekening dengan perhitungan sewa modal selama

masa pinjaman nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Adapun prosedur pengajuan kredit KCA terdapat empat tahap yaitu : tahap pengajuan, tahap perjanjian, tahap realisasi perjanjian dan tahap akhir gadai.

#### b. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

KREASI merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Untuk mendapatkan dana dari KREASI cukup

dengan menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai jaminan sehingga kendaraan masih bisa digunakan

untuk usaha. Adapun ketentuan KREASI dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Ketentuan dalam Kredit Angsuran Sistem Fidusia

Nomer	Aspek	Keterangan
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 3 hari
3	Tarif Sewa Modal	1% flat atau 1% x UP
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang pinjaman
5	Biaya Lainnya	Notaris, Akta Fidusia, Cek Fisik, Asuransi, Materai
6	Jenis Barang Jaminan	BPKB Kendaraan Bermotor
7	Penyimpanan Barang Jaminan	Dipakai Nasabah untuk alat produksi
8	Besarnya Pinjaman	70% dari nilai agunan
9	Jangka Waktu Kredit	12 s.d 36 bulan
10	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap
11	Batas Besarnya Pinjaman	Minimal 1 juta – maksimal 150 juta

(Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan PT Pegadaian (persero) dan Entitas Anak)

Adapun prosedur dari pemberian kredit KREASI pada PT Pegadaian (persero) Konvensional terdapat tiga tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, dan tahap pelaksanaan kredit.

c. Kredit Angsuran Dengan Sistem Gadai (KRASIDA)

KRASIDA adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Barang jaminan yang dapat di gadaikan dalam produk KRASIDA berupa emas dan kendaraan. Peraturan kredit KRASIDA terdapat dalam Keputusan Direksi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor: 114/UG.2.00212/2012 Tentang Jangka Waktu Kredit, Tarif Sewa Modal dan Biaya Adminitrasi Pegadaian Krasida Tarif Sewa Modal dan Biaya. Prosedur dari pemberian kredit KRASIDA Pada PT Pegadaian (persero) Konvensional terdiri dari tahap pengajuan, tahap perjanjian, tahap realisasi perjanjian dan tahap akhir gadai

d. MULIA

Pembiayaan Mulia adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Pada pegadaian konvensional produk Mulia merupakan produk yang diadopsi dari pegadaian syariah, sehingga peraturannya mengikuti prinsip pegadaian syariah. Akad yang digunakan yaitu akad *murabahah* (persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati). Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan Mulia adalah emas batangan bersertifikat internasional (LBMA-London Bullion Market Asosiation ) dengan jenis/varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram. Pembiayaan *murabahah* ini mengenakan margin (*ujrah/bunga*) atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Margin tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi No.16/US.100/2009 perihal jangka

waktu, uang muka dan margin pembiayaan Mulia. Terdapat tiga jenis pembiayaan Mulia pada pegadaian yaitu pembiayaan mulia umum, kolektif dan arisan, apabila nasabah telat membayar maka akan dikenakan *ta'zir* (denda) sebesar 4% di bagi

30 dari tunggakan per hari, dengan maksimum denda 4% dari jumlah angsuran. jumlah angsuran perhari. Untuk mengetahui ketentuan dalam pembiayaan Mulia dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Ketentuan pembiayaan Mulia

Pembiayaan Logam Mulia			
	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam atau Pegadaian	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	- 3 bulan - 6 bulan - 12 bulan - 18 bulan - 24 bulan - 36 bulan	Setiap anggota bebas memilih waktu - 3 bulan - 6 bulan - 12 bulan - 18 bulan - 24 bulan - 36 bulan, Anggota minimal 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maksimal 36 orang
Uang Muka Minimal Pengambilan LM	20% - 25% Setelah lunas	10% Setelah lunas masing - masing anggota	10% dan 15% Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad Pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- per anggota	Rp. 50.000,-

(Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan PT Pegadaian (persero) dan Entitas Anak)

Adapun prosedur permohonan pembiayaan Mulia terdiri dari tahap pengajuan, tahap perjanjian dengan pembayaran uang muka dan tahap realisasi.

## 2. Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada PT Pegadaian (Persero) Syariah.

### a. RAHN

*Rahn* merupakan skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 03/BISNIS I/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Perubahan Perhitungan dan Penyederhanaan Tarif Ujrah (pendapatan yang diterima dari transaksi *ijarah*), Penggolongan *Marhun Bih*, Persentase Penetapan *Marhun Bih* dari



Nilai Taksiran, Diskon *Ujrah*, dan Biaya Administrasi Produk Pegadaian Rahn dapat

dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Ketentuan pembiayaan *Rahn*

Golongan	<i>Marum Bih (Rp)</i>	Tarif <i>Ijarah</i> Baru		Persentase <i>Marhun Bih</i> terhadap Nilai Taksiran Jaminan		Jangka Waktu Kredit	Biaya Administrasi (Rp)
		Emas	Elektro nik	Emas	Elektron ik		
A	50.000,00 - 500.000,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	120 Hari	2.000,00
B <sub>1</sub>	550.000,00 - 1.000.000,00	0,71%	0,72%	0,71%	0,72%	120 Hari	8.000,00
B <sub>2</sub>	1.050.000,00 - 2.500.000,00	0,71%	0,72%	0,71%	0,72%	120 Hari	15.000,00
B <sub>3</sub>	2.550.000,00 - 5.000.000,00	0,71%	0,72%	0,71%	0,72%	120 Hari	25.000,00
C <sub>1</sub>	5.100.000,00 - 10.000.000,00	0,71%	0,72%	0,71%	0,72%	120 Hari	40.000,00
C <sub>2</sub>	10.100.000,00 - 15.000.000,00	0,71%	0,72%	0,71%	0,72%	120 Hari	60.000,00
C <sub>3</sub>	15.100.000,00 - 20.000.000,00	0,71%	0,72%	0,71%	0,72%	120 Hari	80.000,00
D	Diatas 20.100.000,00	0,62%	0,65%	0,62%	0,65%	120 Hari	100.000,00

(Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan PT Pegadaian (persero) dan Entitas Anak)

Adapun prosedur pengajuan kredit *Rahn* terdiri dari tahap pengajuan, tahap perjanjian, tahap tealisasi perjanjian dan tahap akhir gadai.

#### b. *ARRUM*

*Arrum* adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya. Peraturan *Arrum* terdapat dalam Surat Keputusan. Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO ARRUM dan No.03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan Maksimum Nilai Pembiayaan *Arrum*, menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit *Arrum* dengan jaminan fidusia, maksimum Uang Pinjaman Rp 50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan. Berdasarkan Keputusan Direksi No. 15/LB.1.00.01/2010 tentang pembiayaan *Arrum* dengan Jaminan Emas dengan *plafon* pembiayaan minimum dengan jaminan emas ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Batas maksimum nilai pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pembulatan *plafon* dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Tarif biaya administrasi pembiayaan *Arrum* dengan jaminan emas ditetapkan sebesar Rp

70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Nilai pembiayaan *Arrum* dengan jaminan emas ditetapkan sebesar 95% dari taksiran barang jaminan yang didasarkan pada Standar Taksiran Logam (STL) yang berlaku. Tarif *Ijarah* atas pembiayaan *Arrum* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan dengan tarif untuk per seratus ribu nilai taksiran adalah sebesar Rp 950 (sembilan ratus lima puluh rupiah). Jangka waktu pembiayaan *Arrum* dengan jaminan emas ditetapkan selama 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Adapun prosedur pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian (persero) Syariah terdiri dari empat tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit dan tahap pelaksanaan kredit.

#### c. *AMANA*

Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pemberian pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji. Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad *Murabahah*. Apabila kendaraan telah di serahkan maka BPKB kendaraan tersebut ditahan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan. Untuk mengetahui ketentuannya dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Ketentuan pembiayaan Amanah

Nomor	Aspek	Keterangan
1.	Tujuan Pembiayaan	Kepemilikan kendaraan
2.	Waktu Pelayanan	1 - 3 hari
3.	Tarif <i>Ijaroh</i>	1%
4.	Biaya Administrasi	1%
5.	Biaya Lainnya	Asuransi, Materai dll
6.	Uang Muka	20% - 25 % dari harga kendaraan
7.	Jenis Barang yang dibiayai	Mobil dan Sepeda Motor
8.	Jenis Barang Jaminan	BPKB Kendaraan Bermotor
9.	Penyimpanan Barang Jaminan	Dipakai Nasabah untuk beraktivitas
10.	Besarnya Pembiayaan	Tergantung besarnya harga kendaraan tersebut
11.	Jangka Waktu Pembiayaan	a. Mobil 5 Tahun b. Motor 3 Tahun
12.	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap
13.	Batas Besarnya Pembiayaan	Maksimal 150 juta
14.	Akad Pembiayaan	<i>Murabahah</i>

(Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah)

prosedur pembiayaan Amanah pada PT Pegadaian (persero) syariah terdiri dari empat tahap yaitu : tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap keputusan pembiayaan dan tahap realisasi pembiayaan.

#### d. MULIA

Produk Mulia pada pegadaian konvensional dan Mulia pada pegadaian syariah merupakan produk yang sama-sama memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara angsuran dengan prinsip syariah. Adapun peraturan dan mekanisme produk Mulia pada syariah dan pegadaian konvensional sama. Perbedaannya hanya terletak pada selisih pengenaan biaya kirim Mulia yang dibebankan kepada nasabah.

### 3. Perbedaan Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit Pada PT Pegadaian (Persero) Konvensional dan Syariah.

Secara garis besar perbedaan peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional dan pembiayaan pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda, namun apabila diamati lebih mendalam, peraturan produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah terdapat suatu perbedaan. Dalam operasionalnya landasan hukum yang digunakan pada pegadaian konvensional adalah Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160, sedangkan pada pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah MUI yang merujuk pada Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijma' Ulama. Dari perbedaan landasan hukum yang digunakan oleh kedua pegadaian tersebut, sehingga terdapat beberapa peraturan yang berbeda. Untuk mengetahui sejauh mana



adanya perbedaan pelaksanaannya di lapangan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KCA pada pegadaian konvensional dan *RAHN* pada pegadaian syariah

Produk KCA dan *Rahn* merupakan sama-sama pemberian dana kredit/pembiayaan yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kegiatan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan cara memberikan barang jaminan berupa emas dan barang berharga lainnya. Bedanya KCA dan *Rahn* adalah *Rahn* menggunakan sistem gadai sesuai syariah. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KCA di pegadaian konvensional dan *Rahn* pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda.

Ditinjau dari syarat perbedaan hanya ditunjukkan dari istilah Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Kredit (SBR) pada Pegadaian konvensional dan Formulir Permintaan Kredit *Online* (FPKO) dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) pada pegadaian syariah. Waktu angsuran untuk pegadaian konvensional ditetapkan per 15 hari dan per 10 hari untuk pegadaian syariah, Pokok Angsuran pegadaian konvensional Uang Pinjaman x tarif sewa modal berdasar golongan Uang Pinjaman sedangkan pada pegadaian syariah Uang Pinjaman di bagi 12 termin per 10 hari, Angsuran pertermin pada pegadaian konvensional yaitu Pokok Angsuran + Biaya Administrasi + Sewa Modal, sedangkan pada pegadaian syariah Pokok Angsuran + Biaya Administrasi, Dari segi penetapan sewa modal pada pegadaian konvensional ditetapkan berdasarkan uang pinjaman sedangkan *ijarah* pada pegadaian syariah berdasarkan taksiran barang jaminan. Kelebihan hasil lelang pada pegadaian konvensional akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke CSR sedangkan pada pegadaian syariah akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke BAZ, perjanjian atau akad pada pegadaian konvensional yaitu hutang piutang sedangkan pada pegadaian syariah yaitu *Rahn* dan *ijarah*. Dalam mekanismenya tidak jauh berbeda.

- b. Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KREASI pada pegadaian konvensional dan *ARRUM* pada pegadaian syariah

Produk KREASI dan *Arrum* merupakan produk yang sama-sama memberikan dana kredit/pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Menengah (UMKM) dengan cara memberikan barang jaminan berupa BPKB mobil atau motor yang dimilikinya. Bedanya KREASI dan *Arrum* adalah *Arrum* menggunakan sistem sesuai prinsip syariah. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KREASI di pegadaian konvensional dan *Arrum* pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda sebab kedua jenis produk sama hanya saja dalam pegadaian syariah disebut *Arrum*. Perbedaannya terletak pada kelebihan hasil lelang pada pegadaian konvensional akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke CSR sedangkan pada pegadaian syariah akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke BAZ, untuk penetapan uang pinjaman pada pegadaian konvensional ditetapkan 70% dari nilai agunan sedangkan pada pegadaian syariah untuk kendaraan 70% dari nilai agunan dan emas =  $95\% \times \text{taksiran}$ , dan besarnya sewa modal yaitu 12% per tahun *flat*. *Ijarah* pada pegadaian syariah jika  $\text{Emas} = 950 \times (\text{Taksiran/Rp } 100.000)$  dan apabila Non Emas =  $700 \times (\text{Taksiran/Rp } 100.000)$ . Untuk perjanjian/akad pada pegadaian konvensional terdapat satu perjanjian kredit yakni hutang piutang, pada pegadaian syariah terdapat dua akad yakni akad *rahn* dan akad *ijarah*, sedangkan dalam mekanismenya tidak jauh berbeda.

- c. Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KRASIDA pada pegadaian konvensional dan AMANAH pada pegadaian syariah

Produk KRASIDA dan Amanah merupakan dua produk kredit yang tujuannya berbeda. KRASIDA merupakan kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai yaitu memberikan barang jaminan berupa emas dan mobil, sedangkan Amanah merupakan pembiayaan

kepemilikan atas kendaraan bermotor untuk para pegawai dengan cara mengangsur tiap bulan. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KRASIDA di pegadaian konvensional dan Amanah pada pegadaian syariah terdapat perbedaan. Karena jenis produk maupun tujuan dari produk tersebut sudah berbeda. KRASIDA bertujuan untuk memberikan kredit angsuran dengan sistem menggadaikan barang sedangkan Amanah bertujuan untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga peraturan dan mekanisme dari kedua produk tersebut berbeda.

- d. Perbedaan peraturan dan mekanisme produk MULIA pada pegadaian konvensional dan MULIA pada pegadaian syariah

Produk Mulia pada pegadaian konvensional dan Mulia pada pegadaian syariah merupakan produk yang sama-sama memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara angsuran dengan prinsip syariah. Peraturan dan mekanisme pembiayaan Mulia pada pegadaian konvensional dan syariah tidak menunjukkan adanya perbedaan karena produk Mulia merupakan produk pegadaian yang menggunakan sistem syariah baik di pegadaian konvensional maupun syariah

### Pembahasan

Pada PT Pegadaian (persero) Cabang Singaraja produk kredit yang di tawarkan kepada nasabah yaitu KCA, KREASI, KRASIDA dan Mulia. Sedangkan pada PT Pegadaian (persero) Syariah Kartini Cabang Denpasar produk kredit yang tawarkan kepada nasabah yaitu *Rahn*, *Arrum*, Amanah dan Mulia. Istilah bunga dalam pegadaian konvensional dikenal dengan sewa modal sedangkan pada pegadaian syariah di kenal dengan *ijarah*. Tidak semua produk kredit pada pegadaian konvensional bersumber dari pegadaian konvensional namun dalam pegadaian konvensional juga mengadopsi produk kredit/pembiayaan dari pegadaian syariah. Begitu pula sebaliknya pada pegadaian syariah, salah satunya adalah produk pembiayaan Mulia yang diadopsi oleh

pegadaian konvensional dari pegadaian syariah yang mana produk pembiayaan Mulia menggunakan peraturan dan prinsip syariah. Dalam operasionalnya masing-masing produk kredit memiliki peraturan dan mekanisme yang berbeda antara produk satu dengan yang lain baik pada produk kredit pegadaian konvensional maupun syariah.

Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KCA di pegadaian konvensional dan *Rahn* pada pegadaian syariah apabila ditinjau dari syarat perbedaan ditunjukkan dari istilah formulir, perhitungan sewa modal/*ijarah*, lembaga penerima kelebihan hasil lelang, pokok angsuran, perjanjian atau akad. Dari hasil perbandingan perhitungan sewa modal/*ijarah*, menunjukkan bahwa pegadaian syariah lebih murah dibandingkan pegadaian konvensional. Sebab pada pegadaian konvensional sewa modal dihitung dengan bunga akumulatif sedangkan di pegadaian syariah di hitung dengan nilai barang itu sendiri (perhitungan biaya yang ada bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah tetapi dari nilai taksir barang), sedangkan dalam mekanisme antara produk KCA dan *Rahn* tidak jauh berbeda.

Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KREASI di pegadaian konvensional dan *Arrum* pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda sebab kedua jenis produk sama, hanya saja dalam pegadaian syariah disebut *Arrum*. Perbedaannya hanya terletak pada penetapan uang pinjaman, perhitungan *ijarah*/sewa modal, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang. Dari hasil perbandingan perhitungan sewa modal/*ijarah*, menunjukkan bahwa pegadaian konvensional lebih murah dibandingkan pegadaian syariah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam cara perhitungan tarif sewa modal/*ijarah* dan perbedaan pembebanan jumlah biaya administrasi. Sedangkan dalam mekanisme antara produk KREASI dan *Arrum* tidak jauh berbeda.

Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KRASIDA di pegadaian konvensional dan Amanah

pada pegadaian syariah terdapat perbedaan. Sebab dari jenis produk maupun tujuan dari produk tersebut memiliki perbedaan. Adapun KRASIDA untuk kredit angsuran dengan sistem menggadaikan barang sedangkan Amanah untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga dari segi peraturan dan mekanismenya menunjukkan adanya perbedaan dari kedua produk tersebut.

Peraturan dan mekanisme pembiayaan Mulia pada pegadaian konvensional dan syariah tidak menunjukkan adanya perbedaan karena produk Mulia merupakan produk pegadaian yang menggunakan sistem syariah baik di pegadaian konvensional maupun syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme produk kredit/pembiayaan antara pegadaian konvensional dan syariah tidak jauh berbeda. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyusha Desmutya Herfika (2013) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang meneliti tentang analisis komparasi mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional dan pembiayaan pada pegadaian syariah (studi pada PT pegadaian di Nganjuk dan Kediri). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan kredit/pembiayaan pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) di pegadaian konvensional dan *rahn* pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda. Penelitian kedua dilakukan oleh Siti Maryami (2010) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang meneliti tentang tinjauan atas prosedur pemberian kredit usaha mikro pada pegadaian cabang Situsaur Bandung. Hasil penelitiannya adalah prosedur pemberian kredit usaha mikro pada pegadaian sudah dijalankan dengan baik karena telah dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit dan tahap pelaksanaan kredit.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa PT Pegadaian (persero) Syariah Kartini Cabang Denpasar belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional–MUI mengenai sistem dalam pegadaian syariah yaitu bahwa dalam pegadaian syariah tidak mengenal istilah kredit tetapi pembiayaan. Namun pada PT Pegadaian (persero) Syariah Kartini Cabang Denpasar masih menggunakan istilah kredit pada *Rahn* dan *Arrum*, istilah pembiayaan baru digunakan pada produk pembiayaan Amanah dan Mulia.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan adalah peraturan produk kredit antara KCA, KREASI, KRASIDA dan Mulia pada pegadaian konvensional masing-masing memiliki perbedaan antara produk kredit satu dengan yang lainnya, namun untuk mekanismenya tidak semua produk kredit berbeda. Mekanisme antara produk kredit KCA dan KRASIDA memiliki kesamaan dalam pengajuan kredit, yaitu melalui 4 (empat) tahap : (1) tahap pengajuan, (2) tahap perjanjian, (3) tahap realisasi perjanjian dan (4) tahap akhir gadai.

Peraturan dan mekanisme produk pembiayaan *Rahn*, *Arrum*, Amanah dan Mulia pada pegadaian syariah memiliki perbedaan antara produk pembiayaan satu dan yang lain. Perbedaan terjadi dikarenakan dari masing-masing produk pembiayaan syariah memiliki jenis dan tujuan yang berbeda. Peraturan dan mekanisme produk kredit antara pegadaian konvensional maupun pembiayaan pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda, namun perbedaan tersebut tidak merefleksikan perbedaan secara keseluruhan. Perbedaan peraturan dan mekanisme dalam produk kredit yaitu: perbedaan antara produk KCA dan *Rahn* terletak pada istilah formulir, perhitungan *ijarah/sewa* modal, pokok angsuran, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan, perbedaan antara produk KREASI dan *Arrum* terletak pada penetapan uang pinjaman, perhitungan *ijarah/sewa* modal, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan

dan antara produk KRASIDA dan Amanah pada peraturan dan mekanismenya terdapat perbedaan secara keseluruhan.

### Saran

Bagi pihak PT Pegadaian (persero) Syariah Cabang Denpasar diharapkan dalam peraturan dan mekanisme mengikuti peraturan yang di tetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan menggunakan istilah pembiayaan, karena pada pegadaian syariah produk *Rahn* dan *Arrum* masih menggunakan istilah kredit dan mengadopsi produk dari pegadaian konvensional. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan mampu menganalisa tentang produk baru dan meninjau kembali terkait peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian baik konvensional maupun syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri, Soemitra, M.A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: dari Teori dan Praktek*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama. 1971. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta. Yayasan Penyelenggara atau Penterjemah Al-Qur'an.
- Djajasudarma, Hj. T. Fatimah. 2006. *Metode linguistic rancangan metode penelitian dan kajian*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hamidi, M. Luthfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Herfika, Cahyusha Desmutya 2013 Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada Pt Pegadaian Di Nganjuk Dan Kediri). Tersedia pada <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/749/688> (diakses tanggal 02 November 2014).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: prenada Group.
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- , 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mujadi, Kartini dan Gunawan, W. 2007. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai & Hipotek*. Jakarta : Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Presiden Republik Indonesia. Tersedia pada [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) (diakses tanggal 09 Juni 2014).
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqih Sunnah*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- S., Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Bandung : Alfabeta.
- , 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Bandung : Alfabeta.
- <http://www.pegadaian.co.id/>. (diakses tanggal 09 Juni 2014).